

**POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS: DEWAN PIMPINAN
CABANG PARTAI AMANAT NASIONAL KOTA BEKASI DALAM MENETAPKAN
CALONG ANGGOTA LEGISLATIF DPR RI TAHUN 2014-2019)**

Ilham Anshari, Dina Fadiyah

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Sunter Permai Raya - Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara

Email: ilhamanshari@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas tentang Pola Rekrutmen Partai Politik dengan mengambil Studi Kasus, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Tahun 2014-2019. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pola rekrutmen salah satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi, dalam mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif tahun 2014. (2) Untuk mengetahui ranah *secret garden* yang selama ini masih menjadi rahasia publik, dan hanya menjadi konsumsi pribadi segelintir elit di dalam tubuh partai politik. (3) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pola rekrutmen yang digunakan PAN dalam pileg 2014, terhadap kelembagaan PAN di kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan Teori rekrutmen politik dan Teori pola rekrutmen politik. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan format penelitian studi kasus. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka serta dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan pola rekrutmen yang digunakan oleh PAN dengan partai politik lain, yang masih sangat bergantung kepada keputusan pimpinan pusat. Dalam proses penetapan calon, DPP hanya sebagai dewan pertimbangan sementara itu yang memiliki peranan besar adalah pimpinan partai di tingkat daerah, seperti DPW, DPD, DPC dan ranting. PAN memiliki dua cara dalam memilih calon kader yang akan maju dalam proses pemilihan, yaitu memilih calon yang sudah dikenal oleh masyarakat dan putra daerah. Daerah dipilih untuk menjadi pusat dalam pemilihan kandidat, karena pimpinan pusat merasa perlu untuk melibatkan pimpinan partai di daerah sebagai tingkatan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah.

Kata Kunci : Secret Garden, dan Pola Rekrutmen Partai

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji persoalan pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan menghasilkan pemahaman mengenai *secret garden* partai, dalam proses pemilihan calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu legislatif (pileg) DPR RI tahun 2014. Pola yang diterapkan berdasar kepada hal yang tercantum dalam AD / ART partai Bab Visi dan Misi Partai Amanat Nasional dengan sub bab D mengenai garis perjuangan partai poin pertama mengenai Politik dan Hukum, PAN dengan pasti mengedepankan prinsip pemberian hak otonom kepada daerah dengan maksud untuk memberikan kebebasan kepada daerah, untuk dapat menggali lebih jauh potensi yang ada di daerah tersebut.

Ranah *secret garden* menjadi satu hal yang pasti dimiliki oleh setiap partai politik yang ada di Indonesia. Dalam pembahasan mengenai rekrutmen kader, *secret garden* menjadi sumber dari bagaimana tahapan seseorang sehingga akhirnya dapat terpilih menjadi wakil dari sebuah partai politik. Adanya *secret garden* seharusnya dapat diketahui oleh publik, dengan tujuan agar masyarakat luas dapat mengetahui tahapan-tahapan atau cara yang digunakan oleh setiap partai politik dalam mencari kader terbaik yang akan menjadi wakil dari partai politik tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan lokus kajian pada DPC PAN Mustika Jaya Kota Bekasi yang juga menjadi pusat berjalannya ranah *secret garden* partai karena dalam proses pemilihan anggota legislatif 2014, berdasarkan kepada AD ART partai yang memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan partai di daerah untuk memilih kader terbaik yang akan menjadi wakil PAN dalam setiap proses pemilihan umum, baik di tingkat legislatif atau eksekutif. DPC sebagai pimpinan di daerah tingkat kecamatan juga memiliki peranan penting dalam proses penyaringan calon kader yang akan mengikuti kontestasi pemilihan mewakili PAN. Peran yang dimiliki oleh DPC tersebut, juga di bantu oleh DPD Kota Bekasi, ranting, hingga pengurus rayon.

Prinsip yang digunakan oleh seluruh kader PAN dalam bertindak, berdasarkan kepada tiga hal utama, Pertama Reunifikasi dimana pengurus PAN di setiap periode nya selalu berusaha untuk kembali mengajak kepada para pendiri partai terdahulu untuk bisa bersama-sama membangun PAN agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat, dan dapat berkontribusi lebih

banyak kepada negara. Kedua, Regenerasi yang dimaksudkan PAN selalu berusaha untuk menghasilkan kader-kader baru yang lebih memiliki wawasan luas, serta dapat berkontribusi secara maksimal dalam mewakili partai atau dalam mendukung jalannya pemerintahan. Ketiga, Revitalisasi yang dapat diartikan seluruh pengurus PAN baik di tingkat pusat, provinsi, kota, hingga kelurahan memiliki tugas yang merata dalam setiap proses pemilihan. Pemberian kebebasan kepada daerah untuk memiliki hak otonom, menjadi poin utama dalam hal revitalisasi.

Penerapan pola rekrutmen berbeda dengan menggunakan dua proses yang tentunya berbeda dengan partai politik lainnya, menjadikan muncul dampak-dampak yang terjadi dalam kepengurusan internal PAN, terkhusus dalam lingkup kepengurusan DPD Kota Bekasi, hingga DPC Mustika Jaya Kota Bekasi. Adanya dampak yang ditimbulkan tersebut, memunculkan pula stigma dari pengurus partai di tingkat daerah, untuk mereka tidak perlu memikirkan lagi peluang mereka untuk menjadi calon yang diusung partai di setiap proses pemilihan.

Kebutuhan untuk memenangkan proses pemilihan di seluruh tingkat pemilihan menjadi dasar banyaknya partai melakukan rekrutmen kader tidak berdasarkan pada kualitas yang dimiliki kader. Mendapatkan kader dengan kualitas terbaik melalui proses rekrutmen seharusnya melewati tiga tahap, antara lain sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu (Norris, dalam Katz dan Crotty, 2006:89). Namun, pada kenyataannya kini partai politik lebih berorientasi kepada bagaimana memenangkan pemilu dan mendapatkan kekuasaan. Hal ini pula yang menghasilkan pemimpin pada saat terpilih nantinya, tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, atau bahkan tidak mengetahui apa tugasnya sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti akan memfokuskan pada pertanyaan tentang bagaimana pola perekrutan caleg yang akan maju dalam pileg 2014 dari PAN di Kota Bekasi, sebagai implementasi dari ranah *secret garden* yang masih jarang dibahas dengan serius oleh peneliti terdahulu. Selain itu, mengapa partai tersebut menggunakan pola rekrutmen yang berbeda, dalam hal ini selalu merekrut selebritis yang jika kita melihat lebih jauh, akan sangat beresiko karena dapat menimbulkan gesekan dalam lingkup internal PAN di setiap daerah. Dengan demikian, hal tersebut menjadi dasar kebaruan dari penelitian ini dan mengangkat judul “Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Penetapan Calon Anggota Legislatif 2014-2019 (Studi Kasus : DPC Partai Amanat Nasional Kota Bekasi)”.

REKRUTMEN POLITIK

Pola rekrutmen menjadi *grand theory* dalam penelitian ini, namun sebelum membahas mengenai pola rekrutmen, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai teori rekrutmen politik. Pemilihan teori rekrutmen politik ini juga berdasarkan kepada kesesuaian pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti, serta banyaknya variabel pendukung yang dimiliki oleh teori ini, yang relevan dengan penelitian ini. Rekrutmen politik dijadikan sebagai alat yang dapat digunakan oleh setiap partai politik, demi mendapatkan kader-kader terbaik, yang nantinya akan menjadi calon pemimpin yang juga mewakili partai asalnya (Budiardjo, 2008).

Definisi mengenai rekrutmen politik itu sendiri cukup banyak, definisi dari *Sigit Pamungkas* (2009) menjadi acuan utama dalam melaksanakan penelitian ini. Pamungkas menjelaskan bahwa proses rekrutmen politik menjadi satu hal penting, dan menjadi tolak ukur dari sebuah partai politik dapat dikatakan berhasil menjalankan roda partainya atau tidak. Pamungkas menambahkan dengan adanya rekrutmen politik, dapat menunjukkan sejauh mana tingkatan kekuasaan dalam tubuh partai politik, apakah partai tersebut merupakan partai yang bersifat oligarkis atau bersifat menyebar pada setiap tingkatan kepengurusan partai. Selain itu juga, adanya rekrutmen dalam partai politik dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari keberhasilan partai dalam memilih kader terbaiknya, yang nantinya juga akan menjadi penentu wajah partai di ruang publik.

Sementara itu, pengertian Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan gambar, corak, model yang dipakai untuk menjelaskan satu hal (Prihadi, 275). Sedangkan rekrutmen menurut Czudnowski, (Dalam Pamungkas, Sukmadjati, dan Dwipayana, 2012) dapat diartikan sebagai proses dimana individu atau kelompok individu dilibatkan dalam peran politik aktif. Jika pola rekrutmen partai politik, diartikan sebagai gambaran yang digunakan oleh setiap partai politik untuk mengajak seluruh masyarakat, sesuai dengan pola rekrutmen yang digunakan, untuk dapat ikut berperan aktif di dalam perkembangan politik (Budiardjo, 2008). Berperan aktif dalam dunia politik yang dapat dilakukan, dengan ikut masuk menjadi kader partai politik, diarahkan sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai yang terkandung dalam tubuh partai politik yang diinginkan, dan mengusulkan atau mengikuti kontestasi pemilihan dan menjadi wakil serta representasi dari partai politik yang dipilih.

Rekrutmen kader partai politik, dijadikan sebagai acuan bagaimana gambaran ideologi atau posisi satu partai politik, baik dalam lingkup pemerintahan ataupun dalam menjalankan roda organisasi partainya. Secara sederhana, menurut Norris (Dalam Katz dan Crotty, 2006:89-94), ada 4 (empat) hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengorganisasian partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen, yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*) ?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat diputuskan?

Konsep yang dikembangkan oleh Norris tersebut, mencakup beberapa hal yang juga dapat mempengaruhi seseorang dapat menjadi kader partai politik dan mengikuti proses pemilihan, antara lain adanya unsur seberapa besar tingkat ketokohan dari seseorang yang akan menjadi kader partai politik tersebut. Ketokohan menjadi penting, karena jika kita mengambil contoh dari kasus yang terjadi dalam tubuh PAN pada proses pileg DPR RI 2014, mereka sangat mengedepankan unsur ketokohan untuk merekrut calon yang akan mereka usung, dan selebritis menjadi jalur cepat untuk memudahkan PAN dalam mendapatkan suara.

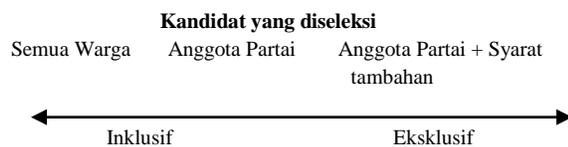
Rahat dan Hazan (Dalam Katz and Crotty, 2006:109), secara sederhana juga menggunakan konsep yang sama dalam melihat rekrutmen kader partai politik, namun menggunakan pembahasan yang lebih rinci. Dalam hal siapa yang dinominasikan, Rahat dan Hazan lebih melihat kepada sosok yang akan maju dinominasikan oleh partai politik, haruslah mampu untuk merepresentasikan suara partai dan harus mampu untuk mempengaruhi pemilih. Sementara itu, untuk siapa yang menyeleksi, Rahat dan Hazan lebih melihat kepada aspek aturan yang digunakan dalam memilih orang yang akan menjadi penyeleksi kader baru partai. Apakah anggota partai biasa dapat juga untuk menjadi penyeleksi dan apakah pada saat sudah memunculkan nama kader akan menimbulkan dampak bagi partai pada saat mengikuti proses pemilihan.

Dari keempat hal tersebut, dapat melahirkan kembali model pengelolaan setiap partai politik, apakah menggunakan model inklusif atau eksklusif. Kedua pola yang masing-masing memiliki karakteristik dan pola masing-masing. Dalam model inklusif, seluruh pemilih atau anggota partai atau masyarakat bisa maju untuk menjadi kandidat dari satu partai, dan yang

menjadi pembatas hanyalah peraturan yang sudah ditetapkan negara yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik.

Sementara itu, dalam pola eksklusif tidak semua anggota masyarakat atau anggota partai politik itu sendiri untuk bisa ikut menjadi kandidat bagi partainya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan peraturan yang diberikan oleh partai politik diluar dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini justru akan memberatkan bagi masyarakat atau anggota partai yang ingin maju menjadi calon kandidat bagi partai politik tersebut, dan kondisi tersebut juga semata-mata terjadi dan dilakukan oleh partai politik karena kembali lagi kepada apa tujuan atau orientasi dari masing-masing partai politik yang ada.

Berikut ini bagan mengenai model inklusif dan eksklusif dalam proses penentuan kandidat yang akan diseleksi untuk mengikuti proses pemilihan.

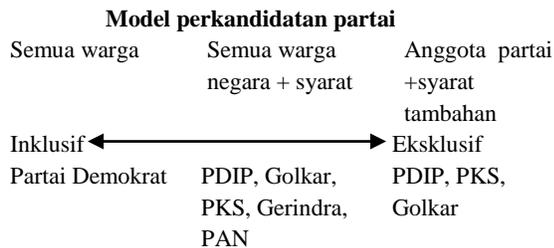


Sumber : Rahat dan Hazan (2006:111), dalam Katz and Crotty :*Handbook of Party Politics*.

PAN menjadi partai yang menerapkan kedua pola rekrutmen dalam sebuah proses pemilihan. PAN bersifat inklusif, dengan mencari calon kader dari masyarakat umum terutama putra/i daerah yang memiliki potensi serta kemampuan dalam memimpin dan memiliki visi misi sama dengan PAN secara keseluruhan. Selain itu, dalam pola inklusif tersebut PAN juga membuka kesempatan sebanyak-banyaknya kepada tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang salah satunya dari kalangan selebritis untuk bersedia untuk menjadi wakil PAN dalam proses pemilihan di seluruh tingkatan pemilihan. Sementara itu, pola eksklusif juga masih menjadi andalan, dengan memunculkan nama-nama anggota partai yang sudah dikenal dan berpotensi memenangkan PAN dalam proses pemilihan. Kedua pola yang diterapkan oleh PAN tersebut, hingga kini masih diterapkan di setiap momentum pemilihan.

Konsep yang dikembangkan oleh Rahat dan Hazan sebelumnya, juga menjadi pembahasan yang saling berkaitan dengan konsep yang dikembangkan oleh Sigit Pamungkas, Mada Sukmajati, Ari Dwipayana, dan Rachmad Gustomy (Lihat bagan dibawah) mengenai

model kandidasi dalam tubuh partai politik. Proses kandidasi yang dilaksanakan oleh partai politik di Indonesia secara sederhana dapat dibedakan menjadi tiga jenis kandidasi, yaitu inklusif, inklusif terbatas dan eksklusif.



Sumber : Sukmajati, Pamungkas, Gustomi, dan Dwipayana (2012:28), dalam *“Rekrutmen Kepala Daerah Dalam Teori dan Praktik*

Inklusif secara sederhana diartikan seluruh warga negara berhak untuk mengikuti proses pemilihan, dan hanya berpegang kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pencalonan seseorang dalam proses pemilihan. Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik di Indonesia yang menerapkan metode ini dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap anak bangsa untuk mengikuti proses pemilihan. Dengan catatan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sementara itu, inklusif terbatas menurut Sukmajati, Pamungkas, Gustomi, dan Dwipayana (2012), menjadi model yang diterapkan oleh PDIP, Golkar, PKS, PAN, dan Gerindra. Dalam model ini, setiap partai politik memberikan peluang kepada seluruh masyarakat umum baik anggota partai ataupun non partai untuk dapat ikut menjadi bagian dalam proses pemilihan. Tetapi, berbeda dengan model inklusif, dalam inklusif terbatas setiap partai politik, menambahkan beberapa peraturan tambahan yang dimunculkan dari dalam tubuh partai politik itu sendiri. Gerindra dan PAN menjadi dua partai yang menerapkan model inklusif terbatas, baik untuk anggota partai atau non anggota. Sementara PDIP, PKS, dan Golkar menjadi partai yang menerapkan inklusif terbatas hanya untuk calon kandidat non partai. Setiap calon kandidat yang memilih PAN dan Gerindra, baik anggota ataupun non anggota mendapatkan perlakuan dan pemberian aturan yang sama dan tidak ada pembeda pada saat kandidasi berlangsung. Sementara PDIP, PKS, dan Golkar memberikan peraturan yang berbeda terhadap kandidat non anggota

dengan kandidat dari anggota partai. Peraturan khusus kepada kandidat non anggota, biasanya meliputi syarat batasan usia, kapasitas finansial, popularitas, serta persyaratan tambahan lainnya sesuai dengan kondisi partai itu sendiri.

Model eksklusif menerapkan cara yang lebih tertutup dibandingkan dengan model kandidasi lainnya. Model ini tidak membuka secara meluas dan tidak memberikan peluang kepada masyarakat umum untuk dapat mengikuti proses pemilihan, mewakili partai yang menggunakan metode eksklusif ini antara lain PDIP, PKS, dan Golkar menjadi tiga partai yang menggunakan model kandidasi eksklusif. Pamungkas, dkk menambahkan ketiga partai yang menggunakan model eksklusif tersebut mewajibkan kepada setiap kader yang ingin mengikuti pemilihan melalui partainya, harus terlebih dahulu menjadi anggota partai, dan harus menjalankan persyaratan tambahan dari partai tersebut. Persyaratan yang diterapkan oleh ketiga partai tersebut meliputi, persyaratan izin dari setiap struktural partai, tidak terkena sanksi partai (kader lama), dan harus mundur dari jabatan pemerintahan yang sedang dijabat .

Partai politik menjadi sumber awal munculnya kader-kader calon yang diajukan oleh setiap partai politik, baik dalam tingkat daerah dan nasional, dengan cara dan metode sesuai keinginan parpol itu sendiri untuk mendapatkan calon yang sesuai dengan visi dan misi setiap partai politik. Namun, menurut Suprihatin (Wawancara Pribadi, 04 Desember 2017) beberapa partai politik yang melakukan rekrutmen kader nya, terkesan terlalu pragmatis dan seperti mengabaikan ideologi partai. Lebih lanjut, Suprihatin mengatakan bahwa PAN kini menjadi partai pencari calon yang dapat memberikan keuntungan dan kepastian suara bagi PAN dalam setiap proses pemilihan. Ideologi partai yang pada kondisi saat ini dalam tubuh partai politik, hanya menjadi peraturan kosong yang disepakati sebelumnya. Karena, kondisi saat ini mendapatkan kekuasaan mutlak masih menjadi tujuan akhir dari setiap partai politik yang ada (Arifin, 2013:86-87).

SECRET GARDEN

Seluruh partai politik di Indonesia menjadikan setiap momentum pemilihan menjadi saat dimana roda partai dijalankan, untuk mendapatkan kader terbaik yang akan mewakili partai politik tersebut dalam mengikuti proses pemilihan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Setiap partai politik di Indonesia memiliki cara tersendiri terkait dengan cara untuk mendapatkan

kader terbaik yang akan di usung oleh partai tersebut. Cara-cara yang digunakan masih terlalu tertutup bagi publik untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya pemilihan seseorang hingga akhirnya dapat maju menjadi wakil dari partai politik tersebut.

Partai politik di Indonesia, masing-masing memiliki ranah “*Secret Garden*” yang tidak boleh ada pihak luar mengetahuinya (Gallagher, 1988:236). Menurut Gallagher, kebun rahasia politik (*secret garden of politics*) menjadi satu hal yang pasti dimiliki oleh seluruh partai politik, yang berorientasikan kekuasaan. Orientasi yang menjadi hak dari seluruh partai politik yang ada, tetapi menjadi satu barometer atau tolak ukur yang kurang baik pada saat seseorang sudah terpilih dalam proses pemilihan, menjadi kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kita sebagai masyarakat umum, pasti akan sulit untuk dapat memahami mengenai *secret garden* partai politik yang ada. Selain tertutup, seluruh partai politik memiliki rahasia tersendiri dalam melaksanakan instruksi untuk melakukan rekrutmen kader (Paper from Centre of Political Science and Comparative Politics Belgium “CESPOL”, 2013:5).

Adanya *secret garden* di setiap partai politik, selain akan menyulitkan masyarakat melihat bagaimana partai politik melaksanakan rekrutmen kader nya, juga akan semakin membuka lebar praktek-praktek kecurangan yang akan dilakukan oleh aktor-aktor yang terdapat di dalam partai politik tersebut, karena kegiatan kompromi politik akan dapat terjadi bilamana adanya situasi saling memberi dan menerima serta adanya timbal balik (Meyer, 2012). Seluruh partai politik memiliki ranah *secret garden* yang hanya bisa diketahui oleh internal partai saja, yang dimaksudkan adanya *secret garden* dapat menjadi senjata bagi setiap partai politik, dalam setiap proses pemilihan. Sikap tertutup yang dilakukan oleh partai politik dalam kaitannya dengan rekrutmen kader menjelang pemilihan, juga berkaitan dengan posisi yang akan dipilih oleh setiap partai politik dalam jalannya pemerintahan, apakah partai tersebut menjadi oposisi, atau kelompok penyeimbang.

Keberadaan ranah *secret garden* juga dapat menjadikan posisi dari partai politik menjadi dilema masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya mengharapkan adanya partai politik dapat menjadi wadah mereka untuk berekspresi, tetapi adanya budaya politik yang justru ditimbulkan oleh elit partai politik itu sendiri, seperti korupsi menjadikan citra partai politik menjadi semakin negatif bagi masyarakat (Meyer, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengambil sudut pandang baru berdasarkan kepada temuan peneliti mengenai rekrutmen partai politik. Sudut

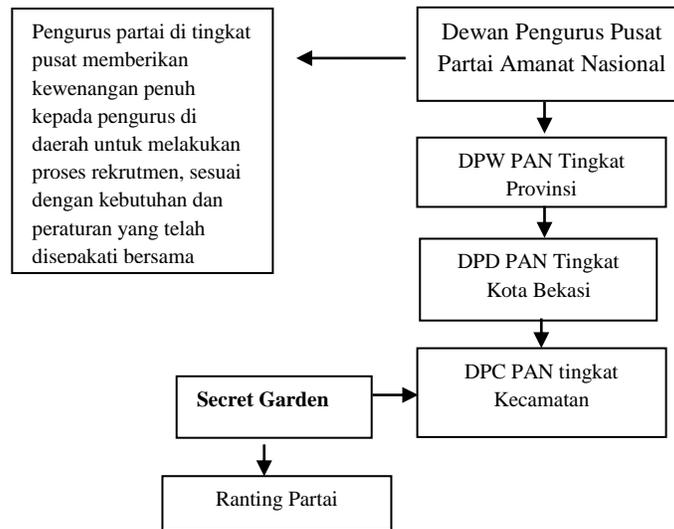
pandang baru tersebut, berkaitan dengan pembahasan pola rekrutmen kader yang menjadi ranah *secret garden* bagi partai politik.

POLA REKRUTMEN PARTAI AMANAT NASIONAL

Pola rekrutmen seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, diartikan sebagai gambaran yang digunakan oleh setiap partai politik untuk mengajak seluruh masyarakat, sesuai dengan jenis rekrutmen yang digunakan, untuk dapat ikut berperan aktif di dalam perkembangan politik di Indonesia. PAN juga memiliki cara atau strategi tersendiri yang digunakan, sebagai implementasi pemberian hak otonom kepada kepengurusan partai di daerah. Secara sederhana, berdasarkan AD / ART partai Bab Visi dan Misi Partai Amanat Nasional dengan sub bab D mengenai garis perjuangan partai poin pertama mengenai Politik dan Hukum, DPP PAN sejak 1998 menggunakan sistem desentralisasi yang cukup kuat, dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada pimpinan partai di tingkat daerah agar dapat menjalankan roda partai di daerah sesuai dengan keadaan dan kondisi yang dimiliki daerah tersebut. Berbeda dengan partai-partai lainnya di Indonesia yang masih menggunakan sistem sentralistik yang mengedepankan instruksi pusat dalam menetapkan sebuah keputusan (Pamungkas, 2012).

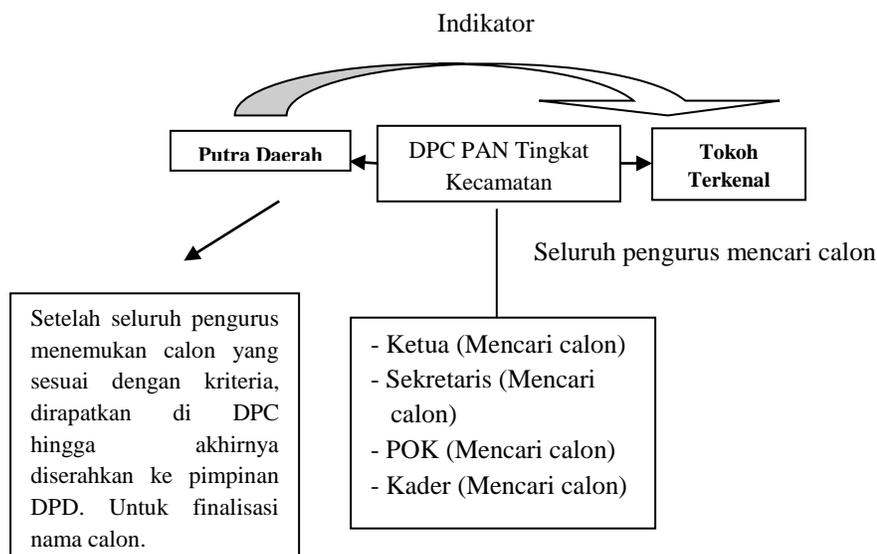
DPD PAN Kota Bekasi sebagai salah satu pemegang hak otonom untuk menentukan calon, memiliki pola tersendiri dalam proses penentuan kader terbaik yang akan maju dalam proses pileg tahun 2014. Pola rekrutmen yang dilaksanakan secara penuh berdasarkan instruksi langsung dari DPP PAN. Dilaksanakan secara penuh dimaksudkan, DPD PAN Kota Bekasi menyebar kepada pimpinan partai di tingkat DPC hingga ranting dalam usaha menjaring kader untuk menjadi wakil partai terkhusus untuk mengikuti kontestasi pemilihan legislatif pada tahun 2014. Hal tersebut justru berbeda dengan pengurus PAN di daerah lain, yang masih tidak menyebar ke seluruh tingkatan partai hingga ke tingkat paling rendah. Secara sederhana, menurut Sandi sebagai ketua POK proses penentuan kader PAN dalam pileg 2014 dapat dilihat dalam bagan dibawah ini. (Wawancara Pribadi, 04 Desember 2017).

Pola Rekrutmen Kader PAN Kota Bekasi



Sumber : Diilustrasikan oleh penulis dari wawancara pribadi penulis.

Sementara itu, jalannya *secret garden* DPD PAN Kota Bekasi, terletak di ranah DPC tingkat kecamatan, dalam hal ini DPC PAN Mustika Jaya Kota Bekasi, dengan gambaran sebagai berikut :



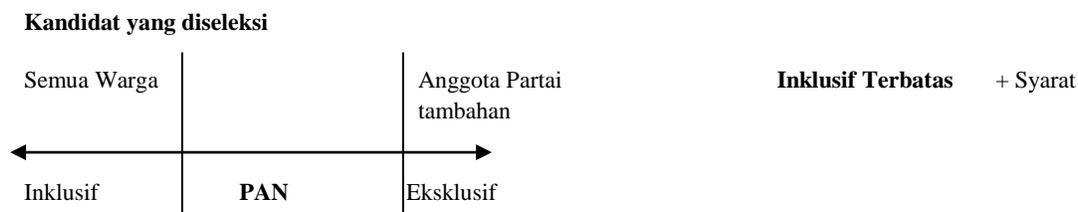
Secret garden PAN Kota Bekasi dalam pileg tahun 2014, terjadi dalam lingkup DPC Mustika Jaya Kota Bekasi. Ketua DPC Mustika Jaya mencari calon, bersama dengan pengurus partai lainnya, seperti sekretaris, bendahara, POK, hingga kader umum mencari calon sesuai

dengan indikator yaitu mencari potensi daerah yang ada di lokasi, dalam hal ini Kecamatan Mustika Jaya dan juga mencari tokoh yang sudah memiliki massa atau jaminan suara yang besar untuk PAN. Dalam kasus Lucky Hakim yang mengikuti kontestasi pileg 2014 dari Kota Bekasi, Ketua DPC bersama seluruh anggota pengurus partai melakukan koordinasi, yang menghasilkan keputusan bahwa diusungny seorang Lucky Hakim untuk mewakili PAN dalam momentum pileg DPR RI tahun 2014. Setelah kesepakatan terjadi, dalam lingkup DPC Mustika Jaya beserta hasil musyawarah yang telah diserahkan kepada DPD PAN Kota Bekasi, seluruh anggota DPD langsung melaksanakan rapat daerah yang membahas mengenai calon yang akan diusung dalam proses pileg DPR RI tahun 2014.

DPD menjadi ranah diskusi bersama dari seluruh pimpinan DPC di wilayah Kota Bekasi, untuk memutuskan calon mana yang akan diusung dengan salah satu syarat tambahannya adalah seorang calon yang akan diusung harus memiliki angka popularitas dan latar belakang yang dapat menguntungkan PAN dalam pileg tahun 2014. Persyaratan tambahan tersebut, berbeda dengan partai politik lain tergantung kepada apa orientasi partai yang digunakan. Sebagai contoh, PDI Perjuangan memiliki syarat tambahan seperti setiap calon kader yang akan mengikuti pemilihan dari PAN harus mampu untuk menjalankan ideologi partai yang diawali dengan adanya kesamaan ideologi yang dimiliki calon tersebut. Dengan adanya hal tersebut semakin menguatkan bahwa PAN termasuk partai politik yang menerapkan jenis pola inklusif terbatas. Setelah kesepakatan tercapai di tingkat DPD, langsung nama calon yang telah disetujui diserahkan kepada pimpinan pusat partai, untuk disetujui sesuai dengan kesepakatan atas dasar kebutuhan dan indikator keuntungan yang akan didapat oleh partai.

DPC Mustika Jaya Kota Bekasi, menjadi daerah kepengurusan partai yang terlibat aktif dalam proses pencarian kader untuk mengikuti pileg DPR RI tahun 2014. Lucky Hakim maju dari dapil Kota Bekasi, atas dasar usaha pencarian yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh pengurus DPD Kota Bekasi, seluruh DPC Kota Bekasi, hingga ranting seluruh wilayah Kota Bekasi. Majunya Lucky Hakim dari PAN menjadi satu ranah yang berbeda dengan partai politik lainnya. Suprihatin menggambarkan bahwa majunya Lucky Hakim, menjadikan Bekasi sebagai daerah asal pemilihannya tanpa menggunakan uang, dan hanya bersedia untuk menjalankan visi misi dengan berpedoman kepada ideologi partai. Tahapan penyeleksian berlangsung dengan juga melibatkan POK dan keseluruhan pengurus partai di daerah.

Merekrut selebritis yang sudah memiliki tingkat popularitas tinggi, menjadi satu strategi yang menguntungkan bagi PAN di setiap momentum pemilihan melihat masih kurangnya kader-kader binaan yang menonjol dan mampu untuk membawa visi misi serta ideologi partai ke hadapan publik. Rahat dan Hazan (2006 : 111) dalam Katz and Crotty : *Handbook of Party Politic* Memberikan dua jenis pola yang dapat dijadikan sebagai ciri partai politik yang ada. PAN menjadi partai politik yang menerapkan pola inklusif terbatas, dengan adanya peraturan tambahan kepada setiap calon kader untuk mengikuti kontestasi pemilihan. Jika dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.



Sumber : Rahat dan Hazan (2006:111), dalam Katz and Crotty :*Handbook of Party Politics*.

Perbedaan mendasar berkaitan dengan pola inklusif dengan inklusif terbatas terletak kepada siapa calon yang diperbolehkan untuk mengikuti proses pemilihan (Anggota partai atau non-partai), dan berkaitan dengan adanya persyaratan tambahan dari partai politik yang menggunakan salah satu pola tersebut. Sementara itu, berdasarkan kepada temuan peneliti dalam majunya Lucky Hakim dalam pileg DPR RI tahun 2014, PAN menjadi partai politik yang menggunakan pola inklusif terbatas, dengan analisa sebagai berikut :

1. PAN memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat (kader dan non kader) untuk mengikuti proses pengkandidatan dari PAN.
2. PAN menempatkan kandidat (kader dan non kader) setara.
3. PAN menggunakan dua cara dalam menyaring calon kandidat.
4. PAN menggunakan syarat tambahan bagi calon kandidat, yang meliputi bersedia untuk menjalankan visi dan misi serta tujuan partai pada saat mengikuti proses pemilihan dan terpilih. Selain itu, harus memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

CALON ANGGOTA LEGISLATIF SELEBRITIS

Mengusung selebritis juga menjadi salah satu strategi utama bagi PAN dalam mengikuti setiap proses pemilihan, terutama dalam lingkup legislatif. Selebritis yang sudah pasti lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat, menjadi pilihan utama PAN dalam merekrut kader untuk mengikuti proses pemilihan. Selebritis walaupun yang tidak memiliki latarbelakang politik atau pemerintahan, tetapi memiliki jaminan suara yang potensial, tetap menjadi pilihan PAN di setiap daerah, termasuk di Kota Bekasi. DPD PAN Kota Bekasi, melihat adanya potensi suara yang cukup besar jika mengusung selebritis dalam pemilihan legislatif tahun 2014. Selebritis yang menjadi wakil dari PAN di seluruh daerah, kebanyakan merupakan hasil pinangan atau lamaran secara langsung PAN kepada sosok selebritis tersebut. (Wawancara Pribadi, 04 Desember 2017). Dalam kasus Lucky Hakim dalam pileg 2014 yang menjadi ranah DPD, berdasarkan temuan dari pengurus DPC di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Lucky Hakim sudah pasti mudah dikenali oleh masyarakat, menjadi selebritis yang dilamar secara langsung oleh PAN, dan di tawari untuk bersedia maju dalam mengikuti proses pemilihan legislatif pada tahun 2014. Dalam proses penjajakan awal pemilihan Lucky Hakim, tidak ada keterlibatan uang dalam proses pemilihan dan pencalonan Lucky Hakim. Lucky Hakim hanya diberikan tawaran untuk maju dalam pileg 2014, dengan potensi kemenangan yang sudah dianalisa sebelumnya oleh pihak DPD, dan selanjutnya jika bersedia partai akan membantu proses pencalonan Lucky Hakim dalam pileg 2014. Hingga akhirnya, kesepakatan tercapai dimana Lucky Hakim bersedia bersaing dengan kandidat lain, dengan bantuan PAN Kota Bekasi, berupa pembekalan dan melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, mengenai kapabilitas seorang Lucky Hakim. Dan hasilnya dalam rilis resmi yang diberikan KPU, Lucky Hakim mendapatkan suara yang cukup besar yaitu 57.891 suara dari Dapil Jawa Barat VI.

Dapil Jawa Barat VI sendiri, merupakan salah satu dapil dengan jumlah caleg terpilih paling sedikit, dari wilayah Jawa Barat. Dapil Jabar VI ini hanya memberikan 6 kursi kepada seluruh calon anggota legislatif terpilih dalam pileg 2014. Lucky Hakim dalam pileg 2014 yang maju dari dapil Jawa Barat VI, mencakup wilayah Kota Bekasi dan Kota Depok dengan perolehan suara cukup tinggi cukup dapat menjadi gambaran bahwa sangat signifikkannya suara yang dapat diberikan oleh seorang selebritis, yang baru pertama kali mengikuti proses pemilihan. Berikut data anggota legislatif terpilih dari dapil Jawa Barat V

Data Perolehan Suara Anggota Legislatif**Terpilih****Dapil Jawa Barat VI**

Sumber : Surat Keputusan KPU

Nomor 416/Ktps/KPU/TAHUN 2014. Tentang
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR RI
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Nama Anggota Terpilih	Jumlah Suara	Partai Politik
Mahfudz Abdurrahman	61.832 Suara	PKS
Sukur H Nababan	123.493 Suara	PDI Perjuangan
Risa Mariska	27.578 Suara	PDI Perjuangan
Wenny Haryanto	32.906 Suara	Golkar
H. Nuroji	52.838 Suara	Gerindra
Lucky Hakim	57.891 Suara	PAN

DAMPAK POLA REKRUTMEN PAN**1. Dampak Internal DPD PAN Kota Bekasi**

- a. Munculnya kecemburuan antar sesama kader di daerah, yang juga ingin mengikuti proses pemilihan. Banyak dari kader PAN di daerah mengeluhkan mengenai kebijakan yang dibuat oleh DPD PAN Kota Bekasi atas pemberian wewenang dari DPP PAN. Banyak kader yang menginginkan untuk setiap proses pemilihan melihat terlebih dulu potensi yang ada dalam anggota partai yang sudah mengetahui bagaimana visi, misi, dan ideologi partai.
- b. Menjadikan anggota partai di daerah hanya menjalankan roda organisasi hanya berorientasi kepada uang, tanpa berharap akan menjadi wakil partai dalam setiap proses pemilihan. Hal ini dirasa wajar, karena banyak kader yang sudah pasrah karena akan ada nama selebritis yang disusung oleh partai dan menutup peluang kader partai untuk dapat mengikuti proses pemilihan.
- c. Terkhusus dampak dari kebijakan pemberian hak otonom kepada daerah, memunculkan kebijakan-kebijakan dari DPD di setiap daerah yang justru menuju ke arah sentralistik dan merusak nilai dari otonomi tersebut. DPD PAN Kota Bekasi menjadi satu kepengurusan PAN di daerah, yang dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan keuntungan secara materi dan kekuasaan. Hal ini sudah sejak lama ditunjukkan ketika beliau baru terpilih untuk menjadi pimpinan DPD PAN Kota Bekasi. Bapak Fathur tidak pernah memaksakan atau untuk tidak melibatkan kepengurusan partai (DPC atau Ranting) dalam memilih calon dalam pileg tahun 2014. Berbeda dengan di

daerah lainnya, yang dipimpin oleh ketua yang menerapkan hak otonom yang berbeda dengan yang terjadi di Kota Bekasi.

2. Dampak Eksternal

a. Akan semakin menimbulkan citra bahwa PAN merupakan partai selebritis. Adanya selebritis memang menjamin adanya pemberian suara yang cukup signifikan, dan menguntungkan bagi PAN dalam hal hak menentukan kebijakan dalam parlemen. Tetapi, jika selebritis terus menerus hanya diberikan pembekalan yang tidak dilakukan secara serius, nantinya masyarakat hanya akan mengenal PAN sebagai partai selebritis, dan akan menjadikan anggota partai yang memiliki kualitas akan semakin sulit untuk membentuk wajah partai yang lebih baik dimata publik.

b. Akan merubah cara pandang partai politik lain mengenai pola rekrutmen yang digunakan. PAN yang menggunakan pola rekrutmen salah satunya adalah merekrut selebritis, dan dapat menghasilkan suara yang cukup signifikan akan menjadikan partai politik lainnya juga akan menggunakan pola yang sama, karena dirasa berhasil untuk mendapatkan suara dengan jumlah yang sulit untuk didapatkan oleh kader yang berasal dari masyarakat umum.

KESIMPULAN

Ranah *secret garden* PAN dalam momentum pileg DPR RI 2014 terjadi dalam lingkup DPC PAN Kota Bekasi. Proses berlangsungnya pencarian kader yang akan diusung, melibatkan seluruh kader partai dibantu oleh POK, yang nantinya akan dirapatkan di tingkat seluruh DPC dan hasilnya akan diserahkan kepada pihak DPD, dan proses akhirnya akan diserahkan kepada DPP untuk persetujuan akhir. Pelaksanaan rekrutmen yang dilakukan oleh PAN menggunakan dua pola rekrutmen yang juga menjadi *secret garden* dari PAN Kota Bekasi, yaitu dengan merekrut kader yang merupakan putra daerah potensial dan merekrut selebritis. Merekrut putra daerah potensial yang memiliki nama besar dan jumlah massa yang juga besar masih menjadi salah satu cara yang digunakan oleh PAN dalam memilih kader untuk maju dalam setiap momentum pemilihan. Sementara itu, selebritis ditawarkan secara langsung oleh PAN melalui kepengurusan partai di daerah untuk menjadikan PAN sebagai

kendaraan politiknya di setiap proses pemilihan. Lucky Hakim yang menjadi selebritis atas rekomendasi DPD PAN Kota Bekasi, menjadi salah satu selebritis yang diusung PAN dalam pileg DPR RI tahun 2014. Dalam proses pemilihan selebritis tersebut, tidak adanya praktek politik uang.

SARAN

A. Bagi Pengurus PAN

PAN di tingkat pusat. Harus lebih diperjelas lagi mengenai pemberian hak otonom kepada pengurus di daerah, dalam penentuan kader yang dipilih untuk menjadi wakil partai dalam kontestasi pemilihan. Selain itu, adanya pengawasan mengenai penerapan hak otonom kepengurusan partai di daerah, agar menghindari sentralisasi elit kepengurusan PAN di tingkat daerah. Selain itu, harus adanya pembenahan dalam pola rekrutmen kader yang selalu menjadikan selebrtisi sebagai target utama yang akan di usung. Dengan pembekalan yang belum mumpuni, akan memunculkan potensi nama partai yang akan dicitrakan buruk oleh publik jika salah dalam memilih kader partai yang akan diusung.

B. Partai Politik di Indonesia

Pemilihan kader partai politik harus melibatkan kepengurusan partai di tingkat daerah, karena kepengurusan partai yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakat yang berada di daerah. Kebanyakan partai politik di Indonesia masih berdasarkan kepada instruksi pusat yang justru memilih kader yang tidak mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung dan nantinya akan berdampak kepada tidak terwujudnya keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Rahman. 2002. *"Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional"*, SIC Surabaya.
- Arifin, Anwar. 2013. *Perspektif Ilmu Politik. Citra Partai Politik*. Jakarta:Pustaka Indonesia.
- Beker, Frans., Rene Cuperus, dalam Anwar Arifin *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi revisi). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Pusataka Pelajar. Yogyakarta.
- J.H. Rapar, 1991.*Filsafat Politik Machiavelli*,Jakarta: CV.Rajawali.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar,2005)
- Krouwel, Andre, (2006) dalam *Handbook of Party Politics*", Richard S Katz dan William Crotty (ed). SAGE Publications.
- Meyer, Thimas. 2012. *Kompromi : Jalur Ideal Menuju Demokrasi*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Norris, Pippa (2006) dalam Richard S Katz dan William Crotty *"Handbook of Party Politics"*, London:SAGE Publication
- Prihadi. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*.Alfa Surabaya.
- Rahat, Gideon., Reuven Y.Hazan (2006) dalam Richard S Katz dan William Crotty *"Handbook of Party Politics"*. London:SAGE Publication Ltd.
- Scrooder, Peter. 2009.*Strategi Politik*.Jakarta : FNS.
- Surbakti, Ramlan.1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pamungkas, Sigit., Mada Sukmadjati, AAGN Ari Dwipayana, Rachmad Gustomy, (2012). *Rekrutmen Kepala Daerah Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta. Jurusan Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada.
- Sigmund Neumann. *"Modern Political Parties,"* dalam *"Comparative Politics: A Reader,* diedit oleh Harry Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm 352.
- Besty Anindya Nur Azmi, 2014. Skripsi *"Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta."* Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Fitri Rahmadnia, 2015. *“Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil 1 dan V Kabupaten Sampang, Jawa Timur.)”*
- Nuraina dan Aos Kuswadi, 2005. *“Pola Rekrutmen Partai Politik Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemilu Pasal 65 Ayat 1 Mengenai Keterwakilan Perempuan 30% (Studi Kasus Kota Bekasi). Jurnal Madani edisi 1/Mei 2005.*
- Roy C. Macridis, *“Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-partai,”* dalam Ichlasul Amal, ed., *Teori-teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta, PT Tiara Wacana: 1996), Hlm. 23. Dalam Tesis Yeby MM, *Pergeseran Positioning Model Kepartaian Partai Islam*. 2015. Jogjakarta.
- Supratiwi. *“Partai Politik dan Politik Hijau: Studi tentang Kepedulian Parpol Terhadap Politik yang Prolingkungan di Kota Semarang.”*
- Wakhidatul Afifa, 2011. Skripsi *“Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang.”* Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang.
- Wengky Saputra, 2012. *“Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi:DPC Partai Demokrat dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam).”* Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Andalas.
- Ying Bai dan Ruixue Jia, 2015. *“Elite Recruitment and Political Stability: The Impact of The Abolition of China's Civil Service Exam.”*